



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023**

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2022**

## **Kata Pengantar**

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat ini dapat diselesaikan dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Renstra 2021 – 2026 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat. Rencana Kerja satuan pemerintah daerah (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah daerah untuk periode 1(satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

Semoga penyusunan RENJA ini bermanfaat bagi pembangunan di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasaman Barat.

Padang Tujuh, 03 Agustus 2022

**KEPALA DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**PAHREIN, S.Sos., M.Si**

NIP.196711041989081004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantari.....	i
Daftar Isi.....	ii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.....	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah .....	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah .....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	30

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. ....	34
3.3. Program dan Kegiatan .....	35

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. ....**

50

### **BAB IV. PENUTUP. ....**

67

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat untuk jangka waktu lima tahun (2021-2026) akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dimana program dan kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang juga dipedomani oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Provinsi.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
  16. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

- Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);
  20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik bidang koperasi dan UKM, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (1), maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

## **BAB 1 : PENDAHULUAN**

- 1.1 : Latar Belakang, menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

- 1.2 : Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- 1.3 : Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4 : Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

- 2.1 : Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan capaian renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun sebelumnya, capaian renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 : Analisis kinerja pelayanan OPD, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 : Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 : Review terhadap rancangan awal RKPD, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 : Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

## **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 : Telaahan terhadap kebijakan nasional, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 : Tujuan dan sasaran Renja OPD, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

- 3.3 : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan pemerintah daerah.

**BAB V : PENUTUP**  
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

#### **LAMPIRAN**



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 11 (sebelas) program yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan. Evaluasi pelaksanaan renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021 memuat pencapaian target kinerja tahun 2021 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2020. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2021), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel 2.1  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
(T.C 29)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)x100
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17				URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				5.755.019.506	5.446.895.118	94,65			
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	7.151.743.047		3.577.703.696	3.423.921.358	95,70	1.588.735.700	5.012.657.058	70,09

2	17	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	6.667.786.625		3.244.511.306	3.099.843.571	95,54	1.438.460.534	4.538.304.105	68,06
2	17	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	5.627.799.792		2.850.797.706	2.728.263.571	95,70	1.322.862.534	4.051.126.105	71,98
2	17	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS Penunjang administrasi perkantoran	975.727.484		298.963.600	285.550.000	95,51	89.618.000	375.168.000	38,45
2	17	01	2	02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Penyediaan Honorarium petugas pengelola keuangan	64.259.349		94.750.000	86.030.000	90,80	25.980.000	112.010.000	174,31
2	17	01	2	03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	21.741.885		8.500.000	8.500.000	100,00	-	8.500.000	39,10
2	17	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan BMD	21.741.885		8.500.000	8.500.000	100,00	-	8.500.000	39,10
		01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	24.800.000	-	25.648.965	25.446.200	99,21			
		01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Bintek Peningkatan Kapasitas Pegawai	13.800.000		12.626.800	12.478.700	98,83			
		01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bintek Peningkatan Kapasitas Pegawai	11.000.000		13.022.165	12.967.500	99,58			

		01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			-	-	-			
2	17	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	255.910.060	204.509.700	203.132.400	99,33	72.111.400	275.243.800	107,55
2	17	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	19.165.069	12.220.000	12.070.000	98,77	6.288.000	18.358.000	95,79
2	17	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Cetak Blanko SPT, SPPD, Kwitansi, Amplop dan Map DKUK yang dibutuhkan	25.365.533	27.561.000	27.556.000	99,98	11.328.000	38.884.000	153,29
2	17	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	1. Jumlah Rapat-Rapat dari Pemerintah Provinsi dan Pusat yang diikuti 2. Jumlah Penyedia Makan/Minum Rapat Koordinasi	211.379.458	164.728.700	163.506.400	99,26	54.495.400	218.001.800	103,13
2	17	01	2	07		<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	72.472.950	43.838.790	41.318.000	94,25	9.625.000	50.943.000	70,29
2	17	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	72.472.950	43.838.790	41.318.000	94,25	9.625.000	50.943.000	70,29

2	17	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	109.031.527		50.694.935	45.681.187	90,11	19.056.341	64.737.528	59,38
2	17	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekwensi Penyediaan Kebutuhan Listrik dan Air untuk Operasional Kantor	109.031.527		50.694.935	45.681.187	90,11	19.056.341	64.737.528	59,38
2	17	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pememrintah Daerah</b>	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	52.341.575		118.459.000	50.305.000	42,47	49.482.425	99.787.425	190,65
2	17	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah alat Elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	37.041.730		109.035.000	94.899.500	87,04	42.422.425	137.321.925	370,72
2	17	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	15.299.845		9.424.000	8.987.000	95,36	7.060.000	16.047.000	104,88
2	17	03				<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase Penilaian Koperasi berkualitas	54.419.950		28.428.400	17.270.900	60,75	5.766.800	23.037.700	42,33
2	17	03	2	01		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota</b>	Persentase Penilaian Koperasi Berkualitas	54.419.950		28.428.400	17.270.900	60,75	5.766.800	23.037.700	42,33

2	17	03	2	01	01	Pengawasan kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti Penilaian kesehatan serta pengawasan Koperasi/Unit simpan pinjam	29.419.950	-	-	#DIV/0!	5.766.800	5.766.800	19,60
		03	2	01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti Penilaian kesehatan serta pengawasan Koperasi/Unit simpan pinjam	25.000.000	28.428.400	17.270.900	60,75			
2	17	05				<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI</b>	% Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	108.306.798	391.091.150	366.092.800	93,61	110.750.000	476.842.800	440,27
2	17	05	2	01		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kab/Kota</b>	Persentase Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	108.306.798	391.091.150	366.092.800	93,61	110.750.000	476.842.800	440,27
2	17	05	2	01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kopetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta pelatihan manajemen pengellaan koperasi	108.306.798	391.091.150	366.092.800	93,61	110.750.000	476.842.800	440,27
2	17	06				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	229.175.573	71.611.800	53.146.100	74,21	25.950.800	79.096.900	34,51
2	17	06	2	01		<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotanya dalam Daerah kabupaten/ Kota</b>	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	229.175.573	71.611.800	53.146.100	74,21	25.950.800	79.096.900	34,51

2	17	06	2	01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Persentase meningkatnya Koperasi yang melaksanakan RAT	229.175.573	71.611.800	53.146.100	74,21	25.950.800	79.096.900	34,51
2	17	07				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	% Pertumbuhan Usaha Mikro	168.700.923	275.832.350	271.266.800	98,34	47.289.200	318.556.000	188,83
2	17	07	2	01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	168.700.923	275.832.350	271.266.800	98,34	47.289.200	318.556.000	188,83
2	17	07	2	01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM Aktif yang terdata	134.880.213	-	-	-	6.224.200	6.224.200	4,61
2	17	07	2	01	04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah UMKM Aktif yang tersedia	33.820.710	275.832.350	271.266.800	98,34	41.065.000	312.331.800	923,49
3						<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>							-	#DIV/0!
3	30					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>							-	#DIV/0!
3	30	04				<b>PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	70.057.185	697.167.600	691.892.300	99,24	15.178.300	707.070.600	1.009,28

3	30	04	2	01		Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kab/Kota	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	70.057.185		697.167.600	691.892.300	99,24	15.178.300	707.070.600	1.009,28
3	30	04	2	01	01	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah Paket Sembako yang disubsidi	34.625.965		31.657.600	30.535.900	96,46	15.178.300	45.714.200	132,02
3	30	04	2	01	02	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Paket Sembako yang disubsidi	35.431.220		665.510.000	661.356.400	99,38	-	661.356.400	1.866,59
3	30	05				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah komodii yang difasilitasi pengembangan produk ekspor	35.914.373		35.852.000	35.412.200	98,77	18.899.400	54.311.600	151,23
3	30	05	2	01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Persentase Fasilitasi Pengembangan Produk Ekspo	35.914.373		35.852.000	35.412.200	98,77	18.899.400	54.311.600	151,23
3	30	05	2	01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah MOU/Kontrak Dagang	35.914.373		35.852.000	35.412.200	98,77	18.899.400	54.311.600	151,23
3	30	06				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Pasar Tertib Ukur	177.156.101		154.412.100	143.642.550	93,03	77.702.700	221.345.250	124,94
3	30	06	2	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Pasar Tertib Ukur	177.156.101		154.412.100	143.642.550	93,03	77.702.700	221.345.250	124,94



3	30	06	2	01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pasar yang ditera, tera ulang alat UTPP dan keelngkapannya	134.880.213	87.167.500	80.175.600	91,98	57.091.800	<b>137.267.400</b>	<b>101,77</b>
3	30	06	2	01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pasar yang ditera, tera ulang alat UTPP dan keelngkapannya	42.275.888	67.244.600	63.466.950	94,38	20.610.900	<b>84.077.850</b>	<b>198,88</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>07</b>				<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regiona	<b>203.326.888</b>	<b>107.741.200</b>	<b>106.291.600</b>	<b>98,65</b>	<b>38.846.500</b>	<b>145.138.100</b>	<b>71,38</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>07</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri</b>	Jumlah Produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional	<b>203.326.888</b>	<b>107.741.200</b>	<b>106.291.600</b>	<b>98,65</b>	<b>38.846.500</b>	<b>145.138.100</b>	<b>71,38</b>
3	30	07	2	01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Terselenggranya Pasaman Barat Expo	203.326.888	107.741.200	106.291.600	98,65	38.846.500	<b>145.138.100</b>	<b>71,38</b>
<b>3</b>	<b>31</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>					-			
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>02</b>				<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Pengembangan) Kawasan Industri berbasis Komoditi Sentra	<b>208.432.124</b>	<b>331.801.209</b>	<b>258.064.610</b>	<b>77,78</b>	<b>106.889.700</b>	<b>364.954.310</b>	<b>175,10</b>

3	31	02	2	01		<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi	208.432.124		331.801.209	258.064.610	77,78	106.889.700	364.954.310	175,10
3	31	02	2	01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana Industri	Jumlah Penyusunan dan Evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/ Kota			-	-	-	10.435.550	10.435.550	#DIV/0!
3	31	02	2	01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	Jumlah IKM yang diberdayakan dalam peran serta masyarakat	208.432.124		331.801.209	258.064.610	77,78	96.454.150	354.518.760	170,09
3	31	03				<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase industri rumah tangga yang dibina	127.906.624		83.378.001	79.893.900	95,82	33.696.100	113.590.000	88,81
3	31	03	2	01		<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) , Izin Perluasan Kawasan Industri (IPK) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Industri Rumah Tangga yang dibina	127.906.624		83.378.001	79.893.900	95,82	33.696.100	113.590.000	88,81
3	31	03	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan komitmen Perolehan IUI, IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem informasi industri nasional yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah yang diberikan fasilitas pemenuhan komitmen perolehan (IUI) kewenangan kabupaten/ Kota	127.906.624		83.378.001	79.893.900	95,82	33.696.100	113.590.000	88,81

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sektor ekonomi. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan pelaksanaan urusan penunjang bidang koperasi dan UKM telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal.

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
(T-C.30)

NO.	Indikator	SPM/s tandar nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Koperasi yang berkualitas			35%	40%	45%	50%	16,11%	32%	40%	45%	
	Persentase Koperasi Aktif			95,25 %	95,50 %	95,75 %	100 %	95,56%	96%	92%	98%	
	Persentase Usaha Mikro menjadi Kecil			1 %	1,5 %	2 %	2,50 %	1,05%	1,2%	1,5%	2%	
	Persentase Usaha Mikro Aktif			95,25 %	95,50 %	95,75 %	100 %	96,20%	92,70%	95,75%	96%	
	Kenaikan PDRB Sektor Perdagangan			1 %	1,25 %	1,5 %	1,75 %	3,28%	3,47%	3,58%	3,89%	
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB			1 %	1,25 %	1,5 %	1,75 %	12,4%	13,01%	13,12%	13,57%	
	Persentase alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			0,050 %	0,075 %	0,1 %	0,15 %	2,69%	3,03%	4,12%	5%	

	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian			-2 %	-1 %	-1 %	1,25 %	4,33%	3,29%	4,5%	4,5%	
	Pertumbuhan Jumlah IKM			2 %	2,25 %	2,50 %	2,75 %	5,58%	1,92%	3%	3%	
	Kontribusi PDRB dari Sektor Industri			14,50 %	14,75 %	15 %	15,25 %	14,28%	12,36%	14,75%	15%	
	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait			34,50 %	34,75 %	35 %	35,25 %	37,5%	23,4%	37%	37%	
	Nilai SAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			B	B	B	B	B	B	B	B	
	Level Maturitas SPIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			2 Level	2 Level	2 Level	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	
	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK			50%	75%	75%	85%	75%	80%	95%	98%	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Penguatan dan pemantapan kelembagaan koperasi.
- 2) Pengembangan kawasan sentra IKM dan penggunaan mesin dan teknologi produksi modern.
- 3) Perlindungan konsumen, pengawasan barang/jasa dan kemetrolagian.
- 4) Kerjasama IKM, IKRT dan UKM dengan investor serta peningkatan daya saing produk IKM, IKRT dan UKM.
- 5) Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dan pengembangan sarana distribusi perdagangan.

Keterbatasan SDM serta mekanisme perencanaan yang belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dapat berimplikasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, seperti:

- 1) Banyaknya program/kegiatan yang muncul di APBD namun tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan, akibatnya beberapa kegiatan tidak dapat diukur pencapaiannya dan tidak berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- 2) Adanya program kegiatan yang tidak melalui tahapan perencanaan yang semestinya seperti program kegiatan yang tidak melalui Musrenbang di tingkat nagari, kecamatan maupun kabupaten.
- 3) Adanya usulan atau kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan karena keterbatasan APBD.
- 4) Tidak tercapainya sejumlah target kinerja RPJMD karena program/kegiatan yang terdapat di dokumen rencana pembangunan tidak diakomodir dalam Renstra dan Renja OPD.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Pada tahun 2022, bahwa APBD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 6.439.326.313,- yang terdiri dari

- 1) Belanja Operasi Rp. 5.346.006.554,-
- 2) Belanja Modal Rp. 1.093.319.759,-

Artinya, struktur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah APBD Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 akan didominasi oleh Belanja Operasi. Sementara itu, jumlah Plafon Belanja Langsung tahun 2022 pagu sementara yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebesar Rp 6.439.326.313,-

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.3  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pasaman Barat  
(T-C.31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Kab. Pasaman Barat</b>	<b>% Pertumbuhan Perizinan</b>	<b>39%</b>	<b>11.025.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Kab. Pasaman Barat</b>	<b>% Pertumbuhan Perizinan</b>	<b>39%</b>	<b>11.025.000</b>	
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Persentase Pertumbuhan Perizinan	39 Dokumen Perizinan	11.025.000	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Persentase Pertumbuhan Perizinan	39 Dokumen Perizinan	11.025.000	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Persentase Penilaian Koperasi berkualitas</b>	<b>39 %</b>	<b>28.440.143</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Persentase Penilaian Koperasi berkualitas</b>	<b>39 %</b>	<b>28.440.143</b>	

	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasaman Barat	Persentase Penilaian Koperasi Berkualitas	39 %	28.440.143	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasaman Barat	Persentase Penilaian Koperasi Berkualitas	39 %	28.440.143	
	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Jumlah KSP/ USP yang sehat</b>	<b>30 KSP/USP</b>	<b>11.025.000</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Jumlah KSP/ USP yang sehat</b>	<b>30 KSP/USP</b>	<b>11.025.000</b>	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah KSP / USP yang sehat	30 KSP/USP	11.025.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah KSP / USP yang sehat	30 KSP/USP	11.025.000	
	<b>ROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>% Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>5.77 %</b>	<b>319.998.696</b>	<b>ROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>% Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>5.77 %</b>	<b>319.998.696</b>	



	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	% Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	89.509.750	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	% Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	89.509.750	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Persentase Kemitraan Usaha Permodalan</b>	<b>2.33 %</b>	<b>89.939.525</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Persentase Kemitraan Usaha Permodalan</b>	<b>2.33 %</b>	<b>89.939.525</b>	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	2,33 %	189.401.300	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	2,33 %	189.401.300	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>% Pertumbuhan Usaha Mikro</b>	<b>3.33 %</b>	<b>144,783,938</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>% Pertumbuhan Usaha Mikro</b>	<b>3.33 %</b>	<b>144,783,938</b>	

	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	35%	240.911.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	35%	240.911.000	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>% Ushaa Mikro yang mendapat pemberdayaan dan pengembangan</b>	<b>3 %</b>	<b>63.319.166</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>% Ushaa Mikro yang mendapat pemberdayaan dan pengembangan</b>	<b>3 %</b>	<b>63.319.166</b>	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Persentase Usaha Mikro yang mendapat pemberdayaan dan Pengembangan	3%	63.319.166	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Persentase Usaha Mikro yang mendapat pemberdayaan dan Pengembangan	3%	63.319.166	
	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>% Perusahaan terdaftar</b>	<b>38 %</b>	<b>129.418.950</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>% Perusahaan terdaftar</b>	<b>38 %</b>	<b>129.418.950</b>	

	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Persentase Pertumbuhan Perizinan	39 %	172.257.953	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Persentase Pertumbuhan Perizinan	39 %	172.257.953	
	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>30 %</b>	<b>751.645.230</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>30 %</b>	<b>751.645.230</b>	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	30 %	751.645.230	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	30 %	751.645.230	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Jumlah komodii yang difasilitasi pengembangan produk ekspor</b>	<b>5 Komoditi</b>	<b>22.300.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Jumlah komodii yang difasilitasi pengembangan produk ekspor</b>	<b>5 Komoditi</b>	<b>22.300.000</b>	

	Penyelenggara n Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Persentase Fasilitasi Pengembangan Produk Ekspor	30 %	29.681.300	Penyelenggara n Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Persentase Fasilitasi Pengembangan Produk Ekspor	30 %	29.681.300	
	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Dalam Kab. Pasama n Barat dan Luar Kab. Pasama n Barat</b>	<b>Jumlah Pasar Tertib Ukur</b>	<b>9 Pasar</b>	<b>131.000.000</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Dalam Kab. Pasama n Barat dan Luar Kab. Pasama n Barat</b>	<b>Jumlah Pasar Tertib Ukur</b>	<b>9 Pasar</b>	<b>131.000.000</b>	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pasar Tertib Ukur	9 Pasar	174,361,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pasar Tertib Ukur	9 Pasar	174,361,000	
	<b>PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Dalam Kab. Pasama n Barat dan Luar Kab. Pasama n Barat</b>	<b>Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional</b>	<b>11 Produk</b>	<b>157.501.260</b>	<b>PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Dalam Kab. Pasama n Barat dan Luar Kab. Pasama n Barat</b>	<b>Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional</b>	<b>11 Produk</b>	<b>157.501.260</b>	

	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Jumlah Produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional	11 Produk	12.960.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Jumlah Produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional	11 Produk	12.960.000	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)</b>	<b>2 Kawasan</b>	<b>317.902.947</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)</b>	<b>2 Kawasan</b>	<b>317.902.947</b>	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi	2 Kawasan/ Sen tra	317.902.947	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi	2 Kawasan/ Sen tra	317.902.947	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Persentase industri rumah tangga yang dibina</b>	<b>3.5 %</b>	<b>79.419.950</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Persentase industri rumah tangga yang dibina</b>	<b>3.5 %</b>	<b>79.419.950</b>	

	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Persentase Industri Rumah Tangga yang dibina	3,5 %	79.419.950	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	Persentase Industri Rumah Tangga yang dibina	3,5 %	79.419.950	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Jumlah data base IKM</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Jumlah data base IKM</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1.000.000</b>	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	JUmlah Data Base IKM	1 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dalam Kab. Pasaman Barat dan Luar Kab. Pasaman Barat	JUmlah Data Base IKM	1 Dokumen	10.000.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.085.716.485</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Pasaman Barat</b>	<b>Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.085.716.485</b>	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	5.510.567.458	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	5.510.567.458	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	17.968.500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	17.968.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	16.770.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	16.770.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	317.975.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	317.975.900	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	59.895.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	59.895.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	120.721.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	120.721.700	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	109.807.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	109.807.500	
--	--	--------------------------	--	------	-------------	--	--------------------------	--	------	-------------	--



Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp. 6.199.652.352,- dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan RPJMD Periode 2021-2026. Setelah dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan, maka kebutuhan anggaran tidak ada perubahan.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Koperasi dan UKM, Industri dan Perdagangan, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pasaman Barat pada umumnya berdasarkan usulan program/kegiatan dari masyarakat.

Program/kegiatan diusulkan melalui Musrembang merupakan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan berupa pembangunan/renovasi pasar nagari dan pelatihan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang koperasi, UKM, IKM dan kerajinan. Usulan program/kegiatan dari masyarakat sebagai berikut :

Tabel T-C.32.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>				
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
	a) Pemberdayaan UMKM (Pelatihan Kader UMKM) b) Pemberdayaan UMKM (Pelatihan Ibu Rumah Tangga Menjahit) c) Pemberdayaan UMKM (Bantuan Untuk Kelompok UMKM Bina Bahari) d) Pemberdayaan UMKM (Bantuan Untuk Kelompok UMKM Kasih Ibu) e) Pemberdayaan UMKM (Bantuan untuk Kelompok UMKM Pohon Seribu) f) Pemberdayaan UMKM (Bantuan Untuk Kelompok UMKM Melati) g) Pemberdayaan UMKM (Bantuan Untuk Kelompok UMKM Harapan Keluarga) h) Pemberdayaan UMKM (Pelatihan Kewirausahaan) i) Pemberdayaan UMKM (Bantuan Sarana Prasarana untuk Kelompok Tani Wanita) j) Pemberdayaan UMKM (Bantuan Sarana Prasarana Peralatan Menjahit) k) Pemberdayaan UMKM (Bantuan Alat Service HP) l) Pemberdayaan UMKM (Bantuan Mesin Alat Pembuat Tusuk Sate) m) Pemberdayaan UMKM (Pelatihan Kewirausahaan)	Kinali Kinali Sasak Ranah Pesisir Sasak Ranah Pesisir Sasak Ranah Pesisir Sasak Ranah Pesisir Sasak Ranah Pesisir Pasaman Pasaman Lembah Melintang Pasaman Seluruh Keccamatan Talamau	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 50 Orang 5 Unit 1 Paket 1 Paket 100 Orang	Pokir
	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>				
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

	Pembangunan /Renovasi Pasar (Rahab Pasar Trans Sakato Jaya)	Sungai Aur	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4 Unit	Pokir
--	---	------------	---	--------	-------

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024, terdapat sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, yakni :

1. Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan target sasaran sebagai berikut :
  - a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT).
  - b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
  - c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
  - d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.
2. Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian, dengan target sasaran sebagai berikut :
  - a. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Kecil Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi.
  - b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
  - c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
  - d. Peningkatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah di selaraskan dengan prioritas pembangunan nasional berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan. Agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3. Pembangunan mental dan pengamalan agama dari ABS SBK dalam kehidupan masyarakat.
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.
6. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan insfrastruktur.
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan.
8. Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi.
9. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam
10. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal.

Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 terdapat misi mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif dengan tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan. Sasaran-sasaran yang akan dicapai yakni, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Berdasarkan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja, indikator sebagai berikut :
  - a. Nilai SAKIP dengan target B
  - b. Level maturitas SPIP 2
  - c. Persentase penurunan jumlah temuan BPK sebesar 75 persen
2. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor IKM, UKM dengan sasaran meningkatkan IKM, UKM dan ekonomi kreatif, indikator sebagai berikut :
  - a. Pertumbuhan jumlah IKM sebesar 2,5%
  - b. Kontribusi pdrb dari sektor industri 15%
  - c. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri IUI kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 35%.
3. Meningkatkan koperasi berkualitas dengan sasaran :
  - Meningkatkan koperasi aktif dengan indikator persentase koperasi aktif 95,75%
  - Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil dengan indikator:

- a. Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil sebesar 2%
- b. Persentase usaha mikro aktif sebesar 95,75%
- 4. Meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan dengan sasaran meningkatnya efisiensi perdagangan, indikator sebagai berikut :
  - a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 12,75%
  - b. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sebesar 0,1%.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat selaku menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian. Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat tertuang 11 program, 17 kegiatan dan 24 sub. Kegiatan.

Tabel 3.3  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
(T-C. 33)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	1 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										4,477,84 2,241			27,990,70 0,441
2	1 7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,893,59 5,603			26,414,53 6,096
2	1 7	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,367,48 1,466			18,184,87 2,612
2	1 7	0 1	2. 02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Meningkatnya pengadministrasian Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Orang/bulan 26 Orang	100 % 9	3,041,815 ,466	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6,061,624, 204
2	1 7	0 1	2. 02	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pengadministrasian Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 30 Orang	90 %	240,466,0 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6,061,624, 204

2	1	0	2.	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya pengadministrasi an Perangkat Daerah	Kab. Pasama n Barat, Semua Kecama tan, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang 0 Dokumen	90 %	85,200,000	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6,061,624,204
2	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								11,050,000				19,765,350	
2	1	0	2.	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola DKUKM Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penataan Barang Milik Daerah DKUKM	Kab. Pasama n Barat, Semua Kecama tan, Semua Kelurahan	100 %	385 Unit 0 Laporan	100 %	11,050,000	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	19,765,350
2	1	1	2,	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								32,185,000				55,342,980	
2	1	0	2.	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti kepemimpinan, Mengikuti Bimtek/Diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kapasitas ASN	Semua Kab/Kot a, Semua Kecama tan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang 0 Orang	100 %	11,000,000	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	18,447,660
2	1	0	2.	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kapasitas ASN	Semua Kab/Kot a, Semua Kecama tan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang 0 Orang	100 %	7,325,000	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	18,447,660



2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kapasitas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang 0 Orang	100 %	13,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	18,447,660
2	17	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah							207,273,637				7,460,718,164		
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Komponen Instalasi bangunan Kantor yang tersedia Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	tersedianya Fasilitas Gedung/Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket 0 Paket	100 %	13,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	349,773,490
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DisediakanJunla h ATK yang dibutuhkan	tersedianya Fasilitas Gedung/Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket1 Paket	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	349,773,490
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	tersedianya Fasilitas Gedung/Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket1 Paket	100 %	33,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6,061,624,204

2	1	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Pemenuhan Barang cetak dan penggandaan	tersedianya Fasilitas Gedung/Banguna n Kantor	Kab. Pasama n Barat, Pasama n, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket 1 Paket	100 %	27,995,000	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	349,773,490
2	1	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	tersedianya Fasilitas Gedung/Banguna n Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecama tan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 25 Kali	100 %	118,188,637	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	349,773,490
2	1	1	2,		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								19,500,000				65,884,500	
2	1	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang tersedia	Tersedianya Peralatan dan Mesin	Kab. Pasama n Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 1 Paket	100 %	19,500,000	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	65,884,500
2	1	1	2,		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								99,770,000				265,587,740	
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya jasa Peneranga Bangunan Kantor	tersedianya Penarangan Bangunan Kantor dan Pelayanan Umum	Kab. Pasama n Barat, Pasama n, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 1 Paket	100 %	74,470,000	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	132,793,870

2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya Penarangan Bangunan Kantor dan Pelayanan Umum	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 1 Paket	100 %	25,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	132,793,870
2	1	1	2,		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								156,335,500				362,364,750
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang, Peralatan dan Mesin serta Kebutuhan Dinas	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket 0 Unit	100 %	60,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	120,788,250
2	1	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang terpelihara	Terpeliharanya Barang, Peralatan dan Mesin serta Kebutuhan Dinas	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 1 Paket	100 %	84,340,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	120,788,250
2	1	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit Gedung Kantor yang terpelihara	Terpeliharanya Barang, Peralatan dan Mesin serta Kebutuhan Dinas	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	100 %	0 Unit 1 Unit	100 %	11,495,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	120,788,250
2	1	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								10,235,000				11,576,250

2	1 7	0 2	2. 02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							10,235,000					11,576,250	
2	1 7	0 2	2. 02	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, CabangPembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	% PertumbuhanPerizinan	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah PertumbuhanPerizinan	tersedianya Izin yang diberikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 %	0 Unit Usaha41 Dokumen	37 DOku me	n 10,235,000	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m		% PertumbuhanPerizinan	37 %	11,576,250
2	1 7	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							35,204,820					62,568,314	
2	1 7	3	2		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							35,204,820					62,568,314	
2	1 7	0 3	2. 01	0 1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Koperasi berkualitas	jumlah Koperasi yang mengikuti Penilaian Kesehatan Koperasi serta pengawasan koperasi Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Kab. Pasama n Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	35 % 0 Unit Usaha	38 %	17,000,000	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m		Persentase Penilaian Koperasi berkualitas	45 %	31,284,157

2	1	0	2.	0	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Koperasi berkualitas	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja jumlah Koperasi yang mengikuti Penilaian Kesehatan Koperasi serta pengawasan koperasi	meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	0 Unit Usaha 35 %	38 %	18,204,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penilaian Koperasi berkualitas	45 %	31,284,157
2	1	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								10,500,000					11,576,250
2	1	4	2		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								10,500,000					11,576,250
2	1	0	2.	0	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang sehat	Jumlah KSP/USP yang Sehat Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	meningkatnya KSP/USP yang Sehat	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 KSP/USP	30 USp/KSP 0 Unit Usaha	32 %	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah KSP/USP yang sehat	30 KSP/USP	11,576,250
2	1	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								304,760,663					335,998,630
2	1	5	2		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								304,760,663					335,998,630
2	1	0	2.	0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	% Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Koperasi yang diberikan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.16 %	100 Orang 0 Orang	70 %	304,760,663	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	5.16 %	335,998,630
2	1	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								85,656,690					94,436,501

2	1	6	2		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							85,656,690						94,436,501
2	1	0	2.	0	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	terciptanya koperasi yang berkualitas	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.25 %	0 Unit Usaha 91 %	100 %	85,656,690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	2.25 %	94,436,501
2	1	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							137,889,465						1,060,008,400
2	1	0	2.		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							137,889,465						1,060,008,400
2	1	0	2.	0	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	% Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pemberdayaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.25 %	0 Dokumen 25 %	25 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% Pertumbuhan Usaha Mikro	3.25 %	265,002,100
2	1	0	2.	0	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	% Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pemberdayaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.25 %	0 Unit Usaha 25 %	25 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% Pertumbuhan Usaha Mikro	3.25 %	265,002,100

														m				
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	% Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Persentase Kemitraan Permodalan	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pemberdayaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.25 %	0 Unit Usaha 25 %	25 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% Pertumbuhan Usaha Mikro	3.25 %	265,002,100
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	% Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pemberdayaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.25 %	0 Orang 25 %	25 %	37,889,465	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% Pertumbuhan Usaha Mikro	3.25 %	265,002,100
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								1,191,866,440			1,343,472,593		
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								129,419,950			189,483,749		
3	30	2	2		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan								129,419,950			189,483,749		

3	3	0	2.	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	% Perusahaan terdaftar	Jumlah Perizinan Pasar dan Pusat Perbelanjaan Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	meningkatnya perizinan Pasar, swalayan dan toko	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 %	20 Dokumen	37 %	129,419,950	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	% Perusahaan terdaftar	36 %	189,483,749
3	3	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								751,645,230				77,445,114
3	3	4	2		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								751,645,230				77,445,114
3	3	0	4	2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	ketersediaan barang kebutuhan pokok	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	0 Laporan 50 %	25 %	50,000,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	25 %	25,815,038



3	3	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat kemudahan dalam Mengakses Kebutuhan Barang Pokok	ketersediaan barang kebutuhan pokok	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	0 Laporan 20 %	25 %	651,645,230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	25 %	25,815,038
3	3	0	2.	0	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok	ketersediaan barang kebutuhan pokok	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	0 Laporan 11 Pasar	25 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	25 %	25,815,038
3	3	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								22,300,000				32,640,430
3	3	5	2		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								22,300,000				32,640,430
3	3	0	2.	0	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah komodii yang difasilitasi pengembangan produk ekspor	Fasilitasi Pengembangan Produk EksporJumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Produk Unggulan Mampu bersaing di pasaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Komoditi	6 Produk Unggulan0 PelakuUsaha	25 %	22,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah komodii yang difasilitasi pengembangan produk ekspor	3 Komoditi	32,640,430
3	3	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								131,000,000				575,391,300
3	3	6	2		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								131,000,				575,391,3

	0												000					00
3	3	0	2.	0	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pasar Tertib Ukur	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah Alat Timbang, Ukur yang ditera, Tera Ulang	tertibnya alat timbang, ukur	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Pasar	0 Unit 30 %	8 Pasar	91,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pasar Tertib Ukur	8 Pasar	191,797,100
3	3	0	2.	0	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pasar Tertib Ukur	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina jumlah pelaku Usaha pemilik alat Timbang, Ukur yang diawasi	tertibnya alat timbang, ukur	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Pasar	0 Orang 30 %	8 Pasar	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pasar Tertib Ukur	8 Pasar	191,797,100
3	3	0	2.	0	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Pasar Tertib Ukur	jumlah perelatan Timbang yang di periksa Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	tertibnya alat timbang, ukur	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Pasar	25 % 0 Unit	8 Pasar	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pasar Tertib Ukur	8 Pasar	191,797,100
3	3	0	7		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								157,501,260					468,512,000
3	3	0	7	2	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								157,501,260					468,512,000
3	3	0	2.	0	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional	Jumlah Produk IKM, UKM yang mampu bersaing Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Produk Unggulan Mampu bersaing di pasaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Produk	10 Produk Unggulan 0 UMKM	10 Produk	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produk bersaing menuju pasar regional	10 Produk	234,256,000

3	3	0	2.	0	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional	Jumlah Produk IKM, UKM yang mampu bersaing di Pasaran Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Produk Unggulan Mampu bersaing di pasaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Produk	10 Produk Unggulan 0 UMKM	10 Produk	107,501,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional	10 Produk	234,256,000	
3	3	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								408,257,358				691,217,598	
3	3	1	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								312,159,218				599,279,078	
3	3	1	2	2	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								312,159,218				599,279,078	
3	3	1	0	2.	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Persentase Pertumbuhan Indsutri	Kawasan Industri Pasaman Barat	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan	0 Dokumen 3 %	1 Kawasan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)	1 Kawasan	299,639,539
3	3	1	0	2.	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah IKM yang diberdayakan dalam peran serta masyarkat	Kawasan Industri Pasaman Barat	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan	0 Dokumen 25 IKM	1 Kawasan	262,159,218	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)	1 Kawasan	299,639,539
3	3	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								96,098,1				91,938,52	

	1											40					0	
3	3 1	0 3	2. 01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							96,098,140					91,938,520	
3	3 1	0 3	2. 01	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase industri rumah tanggan yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	PertumbuhanPerizinan	Meningkatnya IKM yangMemiliki Izin	Kab. Pasama n Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan an	33.25 %	0 Dokumen10 %	25 %	96,098,140	Dana Trans fer Umu m-Dana Aloka si Umu m	Persentase industri rumah tanggan yang dibina	33.25 %	91,938,520
TOTAL													6,077,960,639					30,025,390,632

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk kegiatan tahun 2023 merupakan implementasi tahun ke-3 dari Rencana Strategis tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, yakni Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja, Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor IKM, UKM dengan sasaran meningkatkan IKM, UKM dan ekonomi kreatif, Meningkatkan koperasi berkualitas dan Meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan dengan sasaran meningkatnya efisiensi perdagangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat haruslah yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tercapainya Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 11 program, 17 kegiatan dan 24 sub. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar Rp.6.077.966.039,-

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Pasaman Barat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			KODEFI KASI
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
											Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegia tan				Tolok Ukur	Targe t		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	1 7					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							4,477,84 2,241				27,990,70 0,441			
2	1 7	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,893,59 5,603				26,414,53 6,096			
2	1 7	1	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,367,48 1,466				18,184,87 2,612			
2	1 7	0 1	2. 02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Meningkatnya pengadministra sian Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Orang/bula 26 Orang	n 0 % 9	3,041,81 5,466	Dana Tran sfer Umu m-Dana Alok asi Umu m		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6,061,624 ,204		
2	1 7	0 1	2. 02	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pengadministra sian Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 30 Orang	90 %	240,466,000	Dana Tran sfer Umu m-Dana Alok asi Umu m		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6,061,624 ,204		

2	1	0	2.	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya pengadministrasian Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang 0 Dokumen	90 %	85,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6,061,624,204	
2	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								11,050,000				19,765,350	
2	1	0	2.	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola DKUKM Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penataan Barang Milik Daerah DKUKM	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	385 Unit 0 Laporan	100 %	11,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	19,765,350	
2	1	1	2,		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								32,185,000				55,342,980	
2	1	0	2.	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti kepemimpinan, Mengikuti Bimtek/Diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kapasitas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang 0 Orang	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	18,447,660	

2	17	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kapasitas ASN	Semua Kab/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang 0 Orang	100 %	7,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	18,447,660	
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kapasitas ASN	Semua Kab/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang 0 Orang	100 %	13,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	18,447,660	
2	17	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah							207,273,637				7,460,718,164			
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Komponen Instalasi bangunan Kantor yang tersedia Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	tersedianya Fasilitas Gedung/Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket 0 Paket	100 %	13,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	349,773,490	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DisediakanJumlah ATK yang dibutuhkan	tersedianya Fasilitas Gedung/Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	0 Paket1 Paket	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	349,773,490	



									han					Umu m					
2	1 7	0 1	2. 06	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	tersedianya Fasilitas Gedung/Bangun an Kantor	Kab. Pasam an Barat, Pasam an, Semua Kelura han	100 %	0 Paket 1 Paket	100 %	33,000,0 00	Dana Tran sfer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6,061,624 ,204	
2	1 7	0 1	2. 06	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Pemenuhan Barang cetakan dan penggandaan	tersedianya Fasilitas Gedung/Bangun an Kantor	Kab. Pasam an Barat, Pasam an, Semua Kelura han	100 %	0 Paket 1 Paket	100 %	27,995,0 00	Dana Tran sfer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	349,773,4 90	
2	1 7	0 1	2. 06	0 9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	tersedianya Fasilitas Gedung/Bangun an Kantor	Semua Kab/Ko ta, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	100 %	0 Laporan 25 Kali	100 %	118,188, 637	Dana Tran sfer Umu m- Dana Alok asi Umu m		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	349,773,4 90	
2	1 7	1	2, 1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								19,500,0 00					65,884,50 0	
2	1 7	0 1	2. 07	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang	Tersedianya Peralatan dan Mesin	Kab. Pasam an Barat, Semua Kecam atan, Semua	100 %	0 Unit 1 Paket	100 %	19,500,0 00	Dana Tran sfer Umu m- Dana Alok asi		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	65,884,50 0	

							tersedia			Kelura han					Um m					
2	1 7	1	2, 1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								99,770,0 00					265,587,7 40		
2	1 7	0 1	2. 08	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya jasa Peneranga Bangunan Kantor	tersedianya Penarangan Bangunan Kantor dan Pelayanan Umum	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 1 Paket	100 %	74,470,0 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	132,793,8 70		
2	1 7	0 1	2. 08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya Penarangan Bangunan Kantor dan Pelayanan Umum	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 1 Paket	100 %	25,300,0 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	132,793,8 70		
2	1 7	1	2, 1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								156,335, 500					362,364,7 50		
2	1 7	0 1	2. 09	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang, Peralatan dan Mesin serta Kebdaraan Dinas	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket 0 Unit	100 %	60,500,0 00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	120,788,2 50		

2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang terpelihara	Terpeliharaanaya Barang, Peralatan dan Mesin serta Kebutuhan Dinas	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 1 Paket	100 %	84,340,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	120,788,250	
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit Gedung Kantor yang terpelihara	Terpeliharaanaya Barang, Peralatan dan Mesin serta Kebutuhan Dinas	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuning	100 %	0 Unit 1 Unit	100 %	11,495,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	120,788,250	
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								10,235,000				11,576,250	2.04	
2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								10,235,000				11,576,250		
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Pertumbuhan Perizinan	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota jumlah PertumbuhanP erizinan	tersedianya Izin yang diberikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 %	0 Unit Usaha41 Dokumen	37 DOKu me	n 10,235,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% Pertumbuhan Perizinan	37 %	11,576,250	
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								35,204,820				62,568,314	2.04	
2	17	3	2		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								35,204,820				62,568,314		

2	1	0	2.	0	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Koperasi berkualitas	jumlah Koperasi yang mengikuti Penilaian Kesehatan Koperasi serta pengawasan koperasi Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	35 % 0 Unit Usaha	38 %	17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penilaian Koperasi berkualitas	45 %	31,284,157	
2	1	0	2.	0	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Koperasi berkualitas	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja jumlah Koperasi yang mengikuti Penilaian Kesehatan Koperasi serta pengawasan koperasi	meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	0 Unit Usaha 35 %	38 %	18,204,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penilaian Koperasi berkualitas	45 %	31,284,157	
2	1	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							10,500,000				11,576,250	2.04	
2	1	4	2		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							10,500,000				11,576,250		

2	1	0	2.	0	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/ USP yang sehat	Jumlah KSP/USP yang Sehat Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	meningkatnya KSP/USP yang Sehat	Kab. Pasam an Barat, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	30 KSP/ USP	30 USP/KSP 0 Unit Usaha	32 %	10,500,0 00	Dana Tran sfer Umu m- Dana Alok asi Umu m	Jumlah KSP/ USP yang sehat	30 KSP/ USP	11,576,25 0	
2	1	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								304,760, 663				335,998,6 30	2.04
2	1	5	2		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								304,760, 663				335,998,6 30	
2	1	0	2.	0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	% Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Koperasi yang diberikan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih	Kab. Pasam an Barat, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	5.16 %	100 Orang 0 Orang	70 %	304,760, 663	Dana Tran sfer Umu m- Dana Alok asi Umu m	% Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	5.16 %	335,998,6 30	
2	1	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								85,656,6 90				94,436,50 1	
2	1	6	2		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								85,656,6 90				94,436,50 1	

2	1	0	2.	0	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	terciptanya koperasi yang berkualitas	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.25 %	0 Unit Usaha 91 %	100 %	85,656,690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	2.25 %	94,436,501		
2	1	7	7		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								137,889,465				1,060,008,400	2.04	
2	1	7	0	2.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								137,889,465				1,060,008,400		
2	1	7	0	2.	0	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	% Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pemberdayaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.25 %	0 Dokumen 25 %	25 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	% Pertumbuhan Usaha Mikro	3.25 %	265,002,100	
2	1	7	0	2.	0	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	% Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pemberdayaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.25 %	0 Unit Usaha 25 %	25 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	% Pertumbuhan Usaha Mikro	3.25 %	265,002,100	

2	1	0	2.	0	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	% Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Persentase Kemitraan Permodalan	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pemberdayaan	Kab. Pasam an Barat, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	3.25 %	0 Unit Usaha 25 %	25 %	40,000,0 00	Dana Tran sfer Umu m- Dana Alok asi Umu m	% Pertumbuhan Usaha Mikro	3.25 %	265,002,1 00	
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	% Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Persentase Kimitraan Usaha Permodalan	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pemberdayaan	Kab. Pasam an Barat, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	3.25 %	0 Orang 25 %	25 %	37,889,4 65	Dana Tran sfer Umu m- Dana Alok asi Umu m	% Pertumbuhan Usaha Mikro	3.25 %	265,002,1 00	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								1,191,86 6,440				1,343,472 ,593	
3	3	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								129,419, 950				189,483,7 49	2.04
3	3	2	2		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan								129,419, 950				189,483,7 49	

3	3	0	2	0	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	% Perusahaan terdaftar	Jumlah Perizinan Pasar dan Pusat Perbelanjaan Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	meningkatnya perizinan Pasar, swalayan dan toko	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 %	20 Dokumen 0 Dokumen	37 %	129,419,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	% Perusahaan terdaftar	36 %	189,483,749	
3	3	0	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								751,645,230				77,445,114	2.04
3	3	0	4	2		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								751,645,230				77,445,114	
3	3	0	4	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	ketersediaan barang kebutuhan pokok	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	0 Laporan 50 %	25 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	25 %	25,815,038	



3	3	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Stabilisasai Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat kemudahan dalam Mengakses Kebutuhan Barang Pokok	ketersediaan barang kebutuhan pokok	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	0 Laporan 20 %	25 %	651,645,230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Stabilisasai Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	25 %	25,815,038	
3	3	0	2.	0	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Stabilisasai Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Stabilisasi harga barang kebutuhan Pokok	ketersediaan barang kebutuhan pokok	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	0 Laporan 11 Pasar	25 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Stabilisasai Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	25 %	25,815,038	
3	3	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								22,300,000				32,640,430	2.04
3	3	5	2		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								22,300,000				32,640,430	
3	3	0	2.	0	Misi Dagang bagi ProdukEkspor Unggulan	Jumlah komodii yang difasilitasi pengembangan produk ekspor	Fasilitasi Pengembangan Produk EksporJumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Produk Unggulan Mampu bersaing di pasaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Komoditi	6 ProdukUnggulan0 PelakuUsaha	25 %	22,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah komodii yang difasilitasi pengembangan produk ekspor	3 Komoditi	32,640,430	
3	3	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								131,000,				575,391,3	2.04

	0												000					00	
3	3 0	6	2		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								131,000,000					575,391,300	
3	3 0	0 6	2. 01	0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pasar Tertib Ukur	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Junlah Alat Timbang, Ukur yang ditera, Tera Ulang	tertibnya alat timbang, ukur	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Pasar	0 Unit 30 %	8 Pasar	91,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pasar Tertib Ukur	8 Pasar	191,797,100	
3	3 0	0 6	2. 01	0 2	Pengawasan/Pe nyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pasar Tertib Ukur	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina jumlah pelaku Usaha pemilik alat Timbang, Ukur yang diawasai	tertibnya alat timbang, ukur	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Pasar	0 Orang 30 %	8 Pasar	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pasar Tertib Ukur	8 Pasar	191,797,100	
3	3 0	0 6	2. 01	0 3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Pasar Tertib Ukur	jumlah perelatan Timbang yang di periksa Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	tertibnya alat timbang, ukur	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Pasar	25 % 0 Unit	8 Pasar	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pasar Tertib Ukur	8 Pasar	191,797,100	
3	3 0	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								157,501,260					468,512,000	2.04
3	3 0	7	2		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								157,501,260					468,512,000	
3	3 0	0 7	2. 01	0 1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional	Jumlah Produk IKM, UKM yang mampu bersaing Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di	Produk Unngulan Mampu bersaing di pasaran	Semua Kab/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Prod uk	10 Produk Unggulan 0 UMKM	10 Prod uk	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produk bersaing menuju pasar regional	10 Prod uk	234,256,000	

							Tingkat Kabupaten/Kota													
3	30	07	201	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional	Jumlah Produk IKM, UKM yang mampu bersaing di Pasaran Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Produk Unggulan Mampu bersaing di pasaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Produk	10 Produk Unggulan 0 UMKM	10 Produk	107,501,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional	10 Produk	234,256,000		
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								408,257,358					691,217,598		
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								312,159,218					599,279,078	2.04	
3	31	2	2		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								312,159,218					599,279,078		
3	31	02	201	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Persentase Pertumbuhan Industri	Kawasan Industri Pasaman Barat	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan	0 Dokumen 3 %	1 Kawasan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)	1 Kawasan	299,639,539		

3	3	0	2.	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah IKM yang diberdayakan dalam peran serta masyarakat	Kawasan Industri Pasaman Barat	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kawasan	0 Dokumen 25 IKM	1 Kawasan	262,159,218	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)	1 Kawasan	299,639,539	
3	3	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								96,098,140				91,938,520	2.04
3	3	0	2.		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								96,098,140				91,938,520	
3	3	0	2.	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase industri rumah tangga yang dibangun	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSSPersentase PertumbuhanPerizinan	Meningkatnya IKM yangMemiliki Izin	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.25 %	0 Dokumen10 %	25 %	96,098,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase industri rumah tangga yang dibangun	33.25 %	91,938,520	

	TOTAL	6,077,96 6,039		30,025,39 0,632	
--	-------	-------------------	--	--------------------	--

## **BAB V PENUTUP**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang termuat dalam rencana kerja kan sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan sinergitas antar semua pihak dalam pencapaian tujuan, program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penyusunan Renja sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program untuk membangun satu tahun kedepan. Selain itu diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari semua kegiatan yang dilaksanakan tentu saja Renja ini membutuhkan umpan balik (feedback) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program dimasa mendatang.

Dengan demikian program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Padang tujuh, 03 Agustus 2022

Kepala  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**



**PAHREIN, S. SOS. M.Si**

NIP. 19671104 198903 1 004